



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE,



SOFIAN S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670424 199412 1 002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GRAFIK	v
	DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	2
	1.3 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	26
	1.4 Landasan Hukum	28
	1.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	30
	2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe	30
	2.2 Indikator Kinerja Utama	32
	2.3 Perjanjian Kinerja	34
	2.4 Pohon Kinerja	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	46
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	46
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi	48
	3.3 Analisis Capaian Organisasi	52
	3.4 Analisis Efisiensi	76
	3.5 Akuntabilitas Keuangan	79
BAB IV	PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	20
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	22
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	23
Tabel 1.5	Rincian Pegawai Menurut Pangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	24
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ..	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	33
Tabel 2.3	Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2020 dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	36
Tabel 2.5	Komposisi Belanja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	37
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	47
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja	47

Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024	49
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3.5	Nilai Hasil Angka Kelulusan SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.6	Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	57
Tabel 3.7	Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	58
Tabel 3.8	Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	59
Tabel 3.9	Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	60
Tabel 3.10	Nilai Hasil Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ...	62
Tabel 3.11	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	77
Tabel 3.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	20
Grafik 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	22
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	23

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024	50
Diagram 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govenance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsure pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

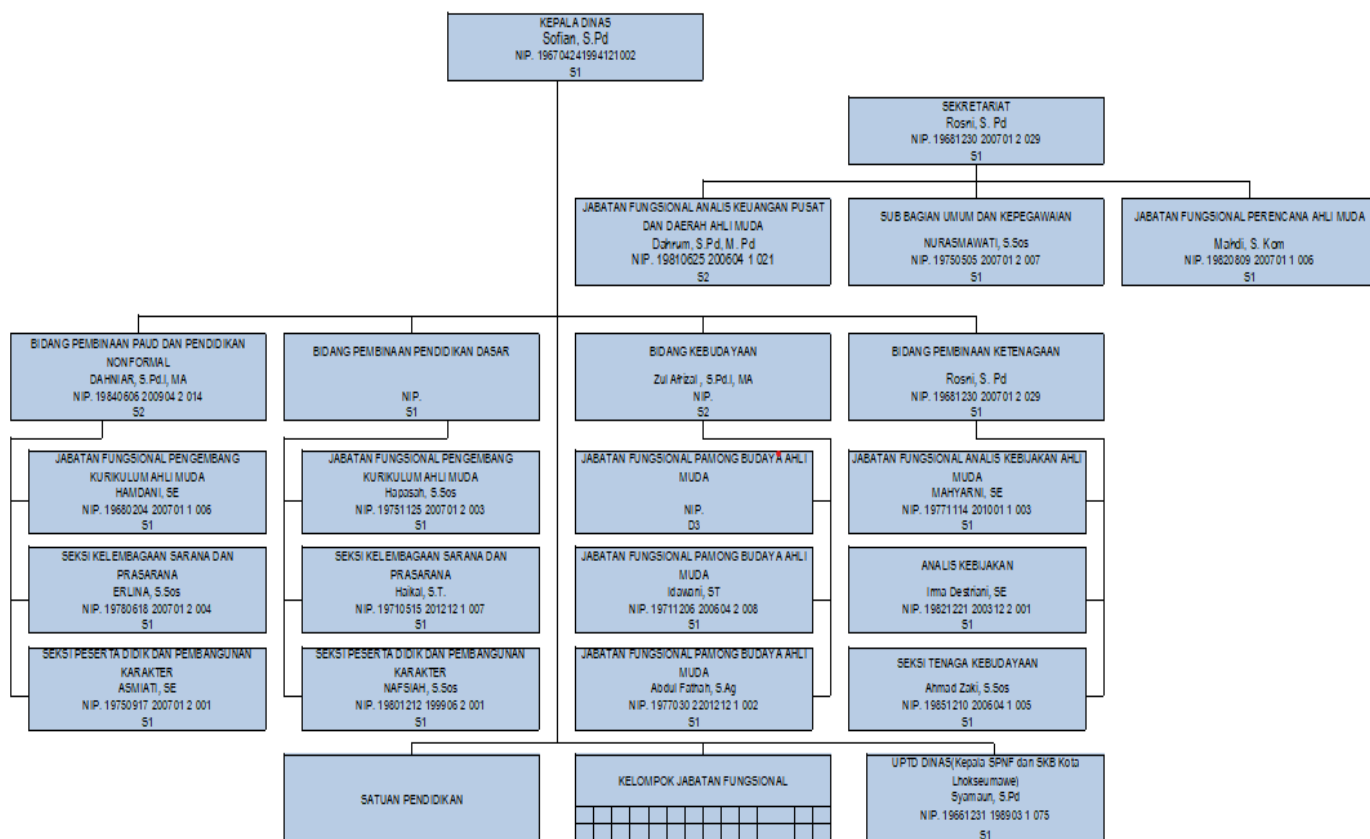
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKEUMAWA

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 11 Mei 2021 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:



Sumber: <https://disdikbud.lhokseumawekota.go.id/>

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan rencana dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;

- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Kebudayaan;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Ketenagaan;
- Pengendalian dan mengawasi terhadap perkembangan pendidikan; Pelaksanaan pembinaan umum tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data dan informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe membawahi subbagian sebagai berikut:

A. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan

- Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.
- Penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan.

C. PERENCANA AHLI MUDA

Tugas Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda adalah sebagai berikut;

- Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Melakukan penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

3. BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta dalam peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang PAUD terdiri atas:

A. FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kurikulum dan penilaian pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal;

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

B. FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kurikulum dan penilaian pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

C. SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

Seksi Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

D. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Melakukan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang Dikdas terdiri atas:

A. PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Pengembang Kurikulum Ahli Muda Mempunyai Tugas Sebagai Berikut;

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

B. SEKSI KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA

Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

C. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

5. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Cagar Budaya dan Museum, Sejarah dan Tradisi, dan Kesenian mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;
- Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kota;
- Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Kota;
- Penyusunan bahan pengelolaan museum Kota;
- Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang Kebudayaan terdiri atas:

A. PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

- Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

6. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Pendidikan Dasar, dan Tenaga Kebudayaan, mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan pada Bidang Ketenagaan adalah sebagai berikut:

A. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas sebagai berikut:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

B. SEKSI PESERTA DIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (ANALIS KEBIJAKAN)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

C. SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe per Desember 2024 sebanyak 57 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

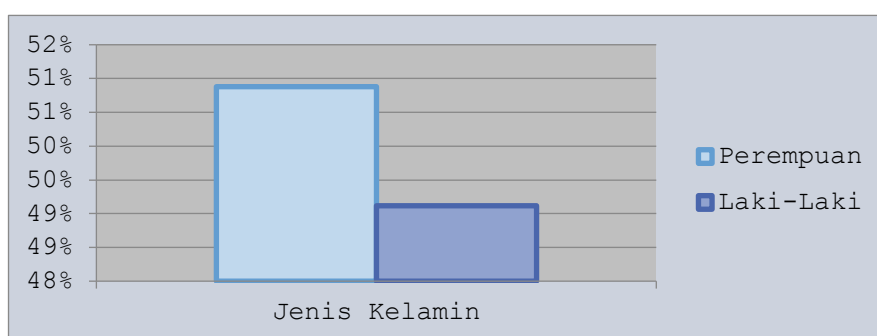
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Plt. Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	1
3	Kepala Bidang	1	2	3
4	Kepala Sub Bagian	0	1	1
5	Kepala Seksi	3	3	6
6	Jabatan Fungsional	7	5	12
7	Pelaksana	15	18	32
Jumlah		28	29	57

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 28 orang atau 49%, dan jumlah Perempuan sebanyak 29 orang atau sebesar 51%.

Grafik 1.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN



Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

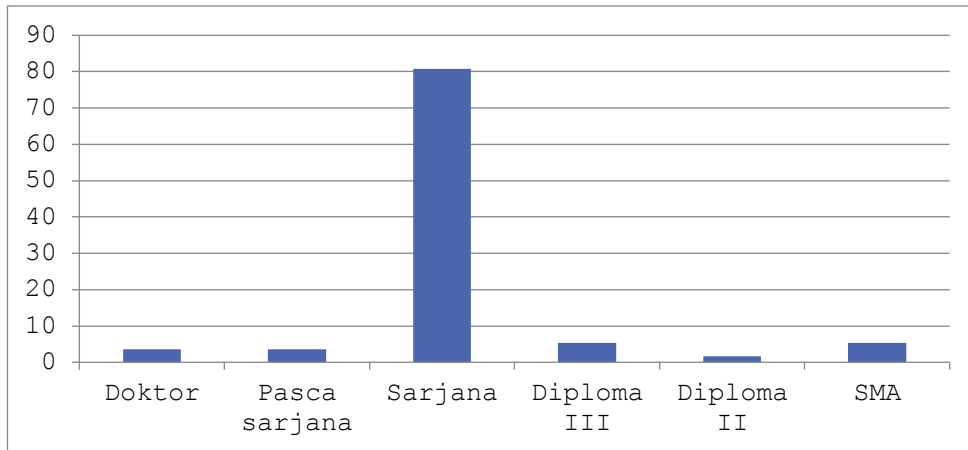
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Plt. Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Bagian Dikdas	-	-	1	-	-	4	-	-
4	Bagian Pembina Ketenagaan	-	-	1	-	-	8	-	1
5	Bagian Kebudayaan	-	-	-	1	-	7	-	-
6	Bagian PAUD & PNF	-	-	-	-	-	5	1	-
7	Bagian Keuangan	-	-	-	-	2	3	-	-
8	Bagian Perencanaan	-	-	-	-	-	2	-	-
9	Bagian Umum & Kepegawaian BMD	-	-	1	-	1	5	-	-
10	Jabatan Fungsional						11	1	
Jumlah		0	0	3	1	3	46	2	2

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Grafik 1.2, dimana jumlah tingkat Pendidikan S3 sebanyak 2 orang atau 3,5%, tingkat Pendidikan S2 sebanyak 2 orang atau 3,5%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 46 orang atau 80,7%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 3 orang atau 5,3%, tingkat Pendidikan Diploma 2 sebanyak 1 orang atau 1,7% dan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 3 orang atau 5,3%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

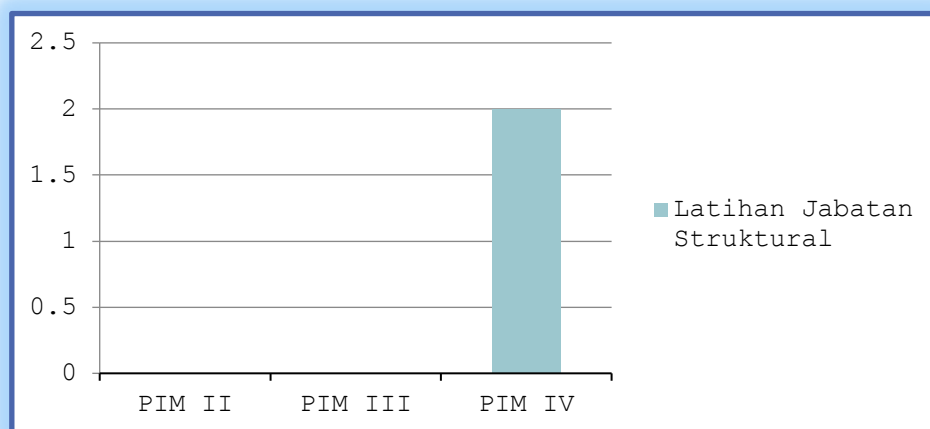
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	-
PIM IV	2
Total	2

Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Komposisi jumlah pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada Grafik 1.3, dimana sebanyak 2 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM IV.

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Jumlah jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon						Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	Plt. Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	-	-	3
4	Kepala Subbagian	-	-	-	-	1	6	7
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	3	-	9	12
TOTAL								24

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 24 jabatan struktural. Dimana eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 7 (tujuh) orang, eselon IV.a sebanyak 1 (satu) orang, dan eselon IV.b sebanyak 15 orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Plt. Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Bidang Dikdas	-	1	4	
4	Bidang Pembina Ketenagaan	-	1	8	1
5	Bidang Kebudayaan	-	1	7	-
6	Bidang PAUD & PNF	-	-	5	1
7	Bagian Keuangan	-	2	3	-
8	Bagian Perencanaan	-	-	2	-
9	Bagian Umum & Kepegawaian BMD	-	2	5	-
10	Jabatan Fungsional			8	4
Jumlah		-	7	42	8

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 8 orang, pangkat/golongan III sebanyak 42 orang, pangkat/golongan II sebanyak 7 orang, dan pangkat/golongan I sebanyak 0 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan
Jenis Kelamin

Jabatan	S3	S2	S1	DI,II,III	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plt. KEPALA DINAS	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
SEKRETARIS	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
SUB BAGIAN KEUANGAN											
Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fungsional	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	3	2	-	-	-	5	-	5	5
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN											
Struktural	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	4	1	1	-	-	6	4	2	6
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	4	-	-	-	-	4	-	4	4
Supir	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	3
Tenaga Keamanan	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	4
SUB BAGIAN PERENCANAAN											
Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL											
Struktural	-	1	2	-	-	-	-	3	-	3	3
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	3	-	-	-	-	3	1	2	3
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR											
Struktural	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Staf PNS	-	-	2	-	1	-	-	3	-	3	3
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	3	1	-	-	-	4	-	4	4
BIDANG KEBUDAYAAN											
Struktural	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1

Fungsional	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2
Staf PNS	-	-	3	1	-	-	-	4	1	3	4
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	2	-	6	-	-	8	3	5	8
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN											
Struktural	-	-	3	-	-	-	-	3	2	1	3
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Staf PNS	1	-	7	-	1	-	-	9	6	3	9
Tenaga Bakti Daerah (TBD)	-	-	6	-	-	-	-	6	-	6	6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL											
Fungsional	-	-	5	-	-	-	-	5	3	2	5
TOTAL	2	2	63	5	17			89	39	50	89

Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebanyak 89 orang yang terdiri dari 57 orang Pegawai Negeri Sipil dan 32 orang diantaranya Tenaga Bakti Daerah (TBD).

1.3 ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RKPK Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGS;

4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Penguatan daya saing usaha
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Provinsi Aceh antara lain meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan aceh;
5. Mensukseskan Pemilu serentak dan PON XXI.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pendidikan;
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

4. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
6. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas guru serta peserta didik, kemudian pendistribusian guru secara merata pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berpedoman pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menindaklanjuti perubahan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah:

“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MELAHIRKAN INSAN CERDAS, KREATIF, MANDIRI DAN BERKARAKTER ISLAMI”

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang dapat memberi pelayanan pendidikan optimal dan professional,
- b. Mewujudkan proses pendidikan yang unggul dalam rangka membangun manusia cerdas, sehat, kreatif, dan islami,
- c. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan yang professional sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, dan
- d. Mewujudkan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di sekolah.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- Meningkatnya Kualitas Pendidikan - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal berdasarkan Nilai-nilai syariat islam - Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	- Angka Kelulusan - Angka Partisipasi Kasar - Angka Partisipasi Murni - Angka Partisipasi Sekolah - Persentase budaya lokal yang dilestarikan - Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal - Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah
2.	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	- Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	- Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	- Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	- Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat tercapai sesuai dengan

perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Nomor 015 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan	%
		Angka Partisipasi Kasar	%
		Angka Partisipasi Murni	%
		Angka Partisipasi Sekolah	%
1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%
		Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	%
1.3	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%
1.4	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	%

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Angka Kelulusan;
2. Angka Partisipasi Kasar;
3. Angka Partisipasi Murni;
4. Angka Partisipasi Sekolah;
5. Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan;
6. Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal;
7. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
8. Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2020, dan Target Akhir
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan							
1	Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar	100	105,99	104,33	102,75	102,75	100,325
3	Angka Partisipasi Murni	100	84,30	99,67	98,62	94,58	92,625
4	Angka Partisipasi Sekolah	100	99,62	99,69	99,72	99,625	98,17
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal							
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	50	-	-	-	50	52
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	75	-	-	-	7,8	13,76
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya							
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	57,67	-	-	-	50	52
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	100	-	-	-	100	100

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran Tahun 2024 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	Rp. 185.771.618.461
Belanja Pegawai	Rp.148.490.257.420
Belanja Barang dan Jasa	Rp.28.816.533.041
Belanja Hibah	Rp. 8.464.828.000
BELANJA MODAL	Rp.24.980.562.355
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 4.376.337.050
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 15.732.043.105
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 199.250.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 4.672.932.200
Jumlah Belanja	Rp. 210.752.180.816
Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 210.752.180.816)
 Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan didalam dokumen Perjanjian Kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak

langsung pada ABPK Tahun 2024 dengan keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp. 210.752.180.81,-

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 215.918.431.876,-

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	Rp. 186.908.418.574
Belanja Pegawai	Rp.150.473.305.500
Belanja Barang dan Jasa	Rp.27.807.225.074
Belanja Hibah	Rp. 8.627.888.000
BELANJA MODAL	Rp.29.010.013.302
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 7.488.097.737
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 15.879.391.055
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 199.250.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 5.443.274.510

Jumlah Belanja	Rp. 215.918.431.876
Total Surplus/(Defisit)	(Rp.215.918.431.876)
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA Pergeseran Setelah Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

2.4 POHON KINERJA

Pohon kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

Nama Pemda	Target Kinerja		
Nama OPD	Satuan	Nilai	Atribut
Sasaran Pemda			
Sasaran OPD			
Indikator Kinerja Sasaran OPD			
Sasaran Program			
Indikator Kinerja Program			
Sasaran Kegiatan			
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)			
Sub Kegiatan (Output)			
Indikator Kinerja Output			
KOTA LHOKSEUMAWE			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			
Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal			
Angka Kelulusan	Bobot		Nilai
Angka Partisipasi Kasar	%	100	Persen
Angka Partisipasi Murni			
Angka Partisipasi Sekolah			
Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan			
Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal			
Meningkatnya Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Terkelolanya Pelayanan Administrasi pada Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan			
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Predikat Baik			
Persentase Terlibnya Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Predikat	B	Nilai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu			
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah	10	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah	12	Laporan
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1115	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah	4	Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah	4	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	80	Laporan
Terlaksananya Adm Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	%

Nama Pemda	Target Kinerja	
Nama OPD	Satuan	Nilai
Sasaran Pemda	Atribut	
Sasaran OPD		
Indikator Kinerja Sasaran OPD		
Sasaran Program	Nama Program	
Indikator Kinerja Program		
Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)		
Sub Kegiatan (Output)		
Indikator Kinerja Output		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		laporan
Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah	3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah	10
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah	1
		laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persentase	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumah	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumah	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumah	5
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100
		%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persentase	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		%
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dibayarkan Pajak	Jumlah	50
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100
		%
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah		
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Minimal Akreditasi		
Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan Dasar		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Bermutu		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Jumlah	2
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Jumlah	2
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang
Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Jumlah	3
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Ruang
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Jumlah	3
		Unit

Nama Pemda					
Nama OPD					
Sasaran Pemda					
Sasaran OPD					
Indikator Kinerja Sasaran OPD					
Sasaran Program					
Indikator Kinerja Program					
Sasaran Kegiatan					
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)					
Sub Kegiatan (Output)					
Indikator Kinerja Output					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	Jumlah	2		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Jumlah	2		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					
Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	Jumlah	3		Ruang	
Pengadaan Mebel Sekolah					
Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah	100		Paket	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah	50		Paket	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah	100		Peserta Didik	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah	110		Orang	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah	635		Orang	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah	110		Satuan Pendidikan	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah	110		Satuan Pendidikan	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah	150		Orang	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Jumlah	5		Ruang	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	110		Dokumen	
Pembangunan Ruang Kelas Baru					
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Jumlah	12		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah					
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	2		Unit	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah	110		Satuan Pendidikan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	5		Ruang	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah	20		Unit	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola					
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah	5		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	5		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	2		Ruang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					

Nama Pemda	Satuan	Nilai	Target Kinerja
Nama OPD			Atribut
Sasaran Pemda			
Sasaran OPD			
Indikator Kinerja Sasaran OPD			
Sasaran Program	Nama Program		
Indikator Kinerja Program			
Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan		
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)			
Sub Kegiatan (Output)			
Indikator Kinerja Output			
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	2	Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	2	Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah	2	Unit
Pengadaan Mebel Sekolah			
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah	150	Paket
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah	50	Paket
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah	100	Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah	40	Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah	25	Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah	25	Satuan Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah	60	Orang
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	15	Dokumen
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah	25	Satuan Pendidikan
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
Jumlah Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah	20	Paket
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah	20	Unit
Meningkatnya Sarana dan Fasilitas Pendidikan PAUD yang Bermutu			
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Pembinaan Terhadap Pendidikan Nonformal			
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B			
Cakupan Jumlah Pembinaan Keterampilan Kecakapan Hidup Non Formal			
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Bermutu	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Jumlah sarana dan prasarana pendidikan PAUD yang dikelola	Jumlah	10	Unit
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah	2	Unit
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			
Jumlah paket Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah	250	Paket
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah	75	Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD			
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan,	Jumlah	50	Orang
Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah	76	Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP PAUD			

Nama Pemda		Target Kinerja	
Nama OPD		Satuan	Nilai
Sasaran Pemda			Atribut
Sasaran OPD			
Indikator Kinerja Sasaran OPD			
Sasaran Program	Nama Program		
Indikator Kinerja Program			
Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan		
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)			
Sub Kegiatan (Output)			
Indikator Kinerja Output			
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOS	Jumlah	132	Satuan Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	154	Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	10	Unit
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD			
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Bermutu			
Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal/kesetaraan yang dikelola	Jumlah	5	Unit
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	1	Unit
Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	Jumlah	1	Unit
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah	5	Unit
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah	15	Orang
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	15	Orang
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	5	Satuan Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	3	Satuan Pendidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah	20	Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	76	Dokumen
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah	5	Paket
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	2	Unit
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah	5	Unit
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	2	Unit
Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	5	Unit
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	76	Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah	5	Paket
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah	5	Paket
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah	2	Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah	2	Unit
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Jumlah	5	Unit
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/kesetaraan			
	Program Pengembangan Kurikulum		
Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum yang Baik			
Jumlah Pengembangan Kurikulum	Jumlah	4	Dokumen
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah	450	Buku
Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah	110	Orang
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah	4	Dokumen
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	Jumlah	4	Dokumen
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah	48	Dokumen
Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	Jumlah	48	Dokumen
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah	48	Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah	48	Dokumen
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah	48	Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah	48	Dokumen

Nama Pemda		Target Kinerja	
Nama OPD		Satuan	Nilai
Sasaran Pemda			Atribut
Sasaran OPD			
Indikator Kinerja Sasaran OPD			
Sasaran Program	Nama Program		
Indikator Kinerja Program			
Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan		
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)			
Sub Kegiatan (Output)			
Indikator Kinerja Output			
Meningkatnya Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Kompetensi Numerasi			
Persentase Pendidik dengan Kualifikasi S1/D4			
Persentase Kepala Sekolah Bersertifikat			
Persentase Pengawas Bersertifikat			
Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkuantitas dan Berkualitas bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkuantitas dan Berkualitas bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah	400	Orang
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	2	Dokumen
Pelaksanaan Penyalokan dan Penempatan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan			
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah	2	Laporan
Meningkatnya Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan		
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah objek kebudayaan yang dikelola	Jumlah	4	Objek
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah	3	Objek
Persentase terlaksananya Objek Kebudayaan yang dikelola	Persentase	100	Persen
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah Objek kesenian tradisional yang dilestarikan	Jumlah	13	Objek
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	Jumlah	13	Objek
Persentase Terlaksana Objek Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persentase	100	Persen
Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
Jumlah objek kesenian daerah yang memperoleh pembinaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah	2	Objek

Nama Pemda					
Nama OPD					
Sasaran Pemda		Satuan	Nilai	Target Kinerja	Atribut
Sasaran OPD					
Indikator Kinerja Sasaran OPD					
Sasaran Program	Nama Program				
Indikator Kinerja Program					
Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan				
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpulan Output)					
Sub Kegiatan (Output)					
Indikator Kinerja Output					
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatih (Ditingkatkan Kompetensinya)		Jumlah	100		Orang
Persentase Terlaksananya Objek kesenian daerah yang mendapat pembinaan		Persentase	100		Persen
Terselenggaranya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					
Jumlah museum yang dikelola					
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					
Persentase Terkelolanya Museum Kota		Jumlah	100		Persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selama Tahun 2024.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

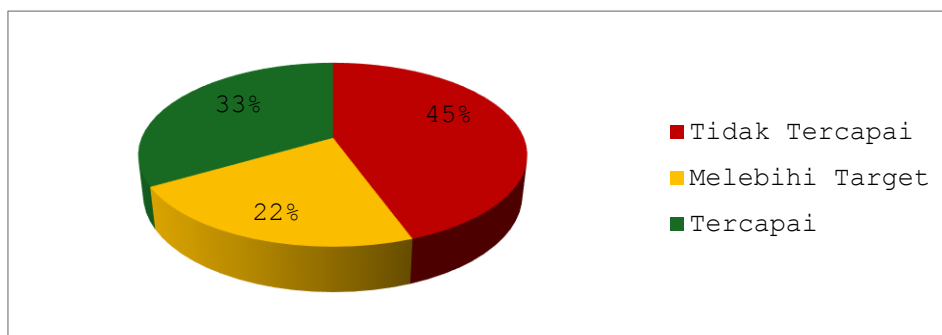
Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 8 (delapan) IKU, dan hasil pengukuran atas IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Tercapai	
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100	100,325	Melebihi Target	
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	92,625	Tidak Tercapai	
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Tidak Tercapai	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	50	52	Melebihi Target	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	75	13,76	Tidak Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	52	Tidak Tercapai	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	Tercapai	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024						

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 8 (delapan) IKU yaitu sebanyak 2 IKU dengan predikat **Tercapai**, 2 IKU dengan predikat **Melebihi Target**, dan 4 IKU dengan predikat **Tidak Tercapai**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan Diagram 3.1 diatas, hasil pengukuran atas capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar **33%** atau 2 IKU telah **Tercapai**, **22%** atau 2 IKU telah **Melebihi Target**, dan **45%** atau 4 IKU **Tidak Tercapai**.

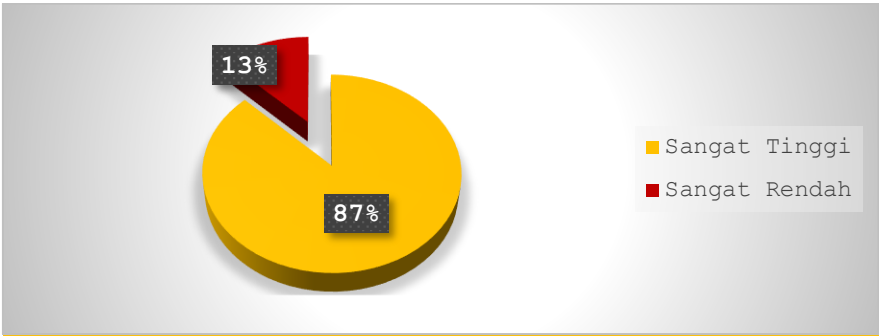
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Sangat Tinggi	
2	Angka Pertisipasi Kasar	Persen	100	100,325	Sangat Tinggi	
3	Angka Pertisipasi Murni	Persen	100	92,625	Sangat Tinggi	
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Sangat Tinggi	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	50	52	Sangat Tinggi	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	75	13,76	Sangat Rendah	

Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	52	Sangat Tinggi	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	Sangat Tinggi	
Capaian IKU Tahun 2024 (%)				75,86	Sedang	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024						

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi yaitu, sebanyak 7 IKU dengan Kategori: Sangat Tinggi; 1 IKU dengan Kategori: Sangat Rendah. Artinya capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 berdasarkan Kategori Kinerja adalah 76,11 (Sedang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 3.2 berikut ini:

Diagram 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, hasil pengukuran berdasarkan kategori kinerja atas capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar

87% atau 7 IKU dengan kategori **Sangat Tinggi**, dan **13%** atau 1 IKU dengan capaian kategori **Sangat Rendah**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

0. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
1. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

Sasaran 1 :	IKU:
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Kelulusan 2. Angka Partisipasi Kasar 3. Angka Partisipasi Murni 4. Angka Partisipasi Sekolah

1. ANGKA KELULUSAN

Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi bagi sekolah yang bersangkutan.

Angka Kelulusan adalah proporsi antara lulusan pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang sekolah pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan adalah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang sekolah yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

Nilai Angka Kelulusan berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan berarti semakin banyak lulusan pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.

Dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan 3 (tiga) aspek yang menentukan apakah siswa dinyatakan lulusan dari satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelesaikan program pembelajaran dibuktikan dengan rapor tiap semester.
2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik.
3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Berikut beberapa faktor penyebab keberhasilan angka kelulusan Pendidikan Dasar:

- Faktor Internal, meliputi: Kualitas Guru, Kurikulum yang Relevan, Penggunaan Teknologi, dan Kondisi Sekolah
- Faktor Eksternal, meliputi: Dukungan Orang Tua, Lingkungan Belajar, Ketersediaan Sumber Daya, dan Kebijakan Pemerintah
- Faktor Siswa, meliputi: Motivasi Belajar, Kemampuan Belajar, Kedisiplinan, dan Kesehatan.

Tabel 3.5
Nilai Hasil Angka Kelulusan SD dan SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian (%)	
		SD	SMP
2020	100	100	99
2021	100	100	99,50
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 796.000.000,-
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 130.000.000,-
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik sebesar Rp. 15.000.000,-

- Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 67.000.000,-
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik sebesar Rp. 10.000.000,-

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Data yang diperlukan untuk menghitung APK adalah sebagai berikut:

- Data jumlah penduduk yang pada tahun t sedang sekolah (atau menjadi siswa) dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
- Data jumlah penduduk per kelompok usia standar (lihat tabel usia standar) yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 110,14% (melebihi target) dan untuk jenjang SMP sebesar 90,51% (tidak mencapai target).

Tercapainya Angka Partisipasi Kasar jenjang SD disebabkan oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai, ketersediaan guru yang berkualifikasi, kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah terakreditasi, serta pengembangan program pendidikan yang relevan dan efektif. Sedangkan tidak tercapainya Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP disebabkan karena minat dari orang tua/peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke Pendidikan Dayah atau Madrasah Tsanawiyah. Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Sekolah Dasar
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar Rp. 425.904.000,-
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp. 314.612.000,-
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebesar Rp. 278.010.000,-
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp. 1,202,182,250,-

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar
Rp. 279,220,000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar
Rp. 188,768,000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sebesar
Rp. 406,806,000,-
 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebesar Rp.
265,923,000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah sebesar Rp. 702,082,000,-
- Sekolah Menengah Pertama
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar
Rp. 615.000.000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar
Rp. 200.000.000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sebesar
Rp. 250,209,000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium sebesar Rp. 336,558,000,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah sebesar Rp. 100.693.000,-

Tabel 3.6
Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian
2020	100	101,74
2021	100	108,62
2022	100	107,71
2023	100	107,71
2024	100	110,14

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Tabel 3.7
Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian
2020	100	110,24
2021	100	100,05
2022	100	97,44
2023	100	97,44
2024	100	90,51

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

3. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Data yang diperlukan untuk menghitung APM adalah sebagai berikut:

- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.
- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun, dst)

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Murni SD sebesar 98,79%

dan untuk jenjang SMP sebesar 86,46%. Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab belum tercapainya target Indikator Kinerja Utama dalam Angka Partisipasi Murni meliputi kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan, serta faktor geografis seperti pembangunan fasilitas sekolah di daerah terpencil untuk meningkatkan akses ke Pendidikan, dan mengembangkan program pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan akses ke pendidikan.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Sekolah Dasar
 - Pengadaaan Mebel Sekolah sebesar Rp. 2.745.000.000,-
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 3,516,800,000,-
- Sekolah Menengah Pertama
 - Pengadaaan Mebel Sekolah sebesar Rp. 994.000.000,-
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp. 56.925.000,-
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.388.600.000,-
 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik sebesar Rp. 100.000.000,-

Tabel 3.8
Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian
2020	99,36	90,49
2021	99,36	99,98
2022	99,36	99,84
2023	99,36	99,73
2024	99,36	98,79

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Tabel 3.9
Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian
2020	86,38	78,1
2021	88,97	93,36
2022	90	96,69
2023	90	89,43
2024	90	86,46

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

4. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SMP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Sekolah SD sebesar 99,97% dan untuk jenjang SMP sebesar 96,37%. Hasil tersebut

menggambarkan pencapaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah dikarenakan beberapa hal, seperti Mutu dan Relevansi Hasil Belajar, Pemerataan Pendidikan yang Bermutu, Kompetensi dan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan, Mutu dan Relevansi Pembelajaran, serta Pengelolaan Sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Sekolah Dasar
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp. 6.352.894.600,-
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp. 1,675,986,000
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 125.000.000,-
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp. 17.824.827.000,-
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp. 5.000.000,-

- Sekolah Menengah Pertama
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp. 1.456.397.000,-
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 500.000.000,-
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp. 9.327.900.000,-
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 5.000.000,-

Tabel 3.10
Nilai Hasil Angka Partisipasi Sekolah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Capaian	
		SD	SMP
2020	100	99,99	99,25
2021	100	99,98	99,4
2022	100	99,84	99,59
2023	100	99,89	99,36
2024	100	99,97	96,37

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Solusi dan strategi yang akan dilakukan dalam memaksimalkan pencapaian IKU sektor Pendidikan adalah :

- a. Pelayanan pendidikan harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada di front terdepan yaitu peran kepala sekolah, guru dan pegawai melalui interaksinya dalam pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan (guru, kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan dan intitusi) dalam perencanaan dan realisasi program pendidikan yang diluncurkan sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan.
- b. Implementasi kemampuan profesional kepala sekolah mutlak diperlukan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan. Kemampuan profesional kepala sekolah akan terwujud apabila memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tatanan mikro, dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro.

- c. Salah satu upaya profesional kepala sekolah adalah melalui motivasi komunikasi dan kepemimpinan yang baik dengan pegawai serta guru akan membawa dampak bagi perkembangan sekolah kearah kemajuan. Dengan motivasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkan bertujuan memberikan pembinaan kepada guru dan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- d. Dalam pelaksanaannya baik kepala sekolah, guru, dan pegawai haruslah bias menciptakan suasana yang harmonis dan kekeluargaan, untuk memberikan efek positif dan kebersamaan dilingkungan sekolah yang mengarah ke peningkatan kinerja yang sesuai dengan harapan. Mewujudkan kondisi ideal dimana kemampuan profesional kepala sekolah dapat diimplementasikan melalui hubungan komunikasi serta gaya kepemimpinan kepala sekolah tergantung pada berbagai komponen sistem pendidikan yang saling berkolaborasi.
- e. Oleh karena itu keterkaitan berbagai komponen pendidikan sangat menentukan implementasi kemampuan kepala sekolah agar mampu mengelola suasana yang nyaman konduktif dengan para guru dan pegawai sehingga terciptanya semangat untuk bekerja yang mengarah ke peningkatan kinerja, maka dari pada itu motivasi komunikasi serta kepemimpinan yang diterapkan oleh para kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya sekolah, atas dasar inilah analisis sumber daya pendidikan melalui tahapan-tahapan pembinaan, pelatihan dan pendidikan terhadap pelaku kegiatan analisis sumber daya pendidikan bisa terwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal berdasarkan Nilai-nilai syariat islam

IKU:

5. Persentase budaya lokal yang dilestarikan

6. Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal

5. PERSENTASE BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN

Dalam konteks era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Arus globalisasi membawa masuknya budaya dan praktik dari luar negeri yang semakin mempengaruhi generasi muda. Media, film, musik, dan internet menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan budaya luar yang seringkali mendominasi dunia digital.

Dampaknya, kebudayaan daerah menjadi terpinggirkan dan semakin dilupakan oleh generasi muda. Banyak anak-anak muda lebih mengenal dan mengikuti budaya luar daripada menghargai dan melestarikan budaya daerah mereka sendiri.

Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya lokal agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap budaya lokal nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan budaya lokal nusantara. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur.

Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan didapat dengan membagi jumlah budaya lokal yang tersedia dengan jumlah budaya lokal yang dilestarikan.

Pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki 25 situs cagar budaya yang terdata, dan 13 situs cagar budaya yang dilestarikan. Dalam hal ini, pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan pada Tahun 2024 adalah sebesar 52% .

Sedangkan pada Tahun 2023 pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan adalah sebesar 50%. Faktor Penyebab terjadinya kenaikan capaian dikarenakan adanya kebijakan pemerintah, kerja sama dan jaringan dengan organisasi lain, kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, sehingga situs cagar budaya yang terdata dan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Lhokseumawe mengalami perubahan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Situs Cagar Budaya yang terdata	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Target	Capaian (%)
2023	22	11	50	50
2024	25	13	50	52

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Berikut daftar cagar budaya yang dilestarikan di Kota Lhokseumawe:

NO.	NAMA SITUS	LOKASI	FOTO SITUS
1	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti	
2	Gua Jepang	Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu	
3	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu	
4	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tiang Gantungan	Makam : Gampong Mongedong Tiang : Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti	

5	Makam Tgk. Dilhokseumawe	Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti	
6	Makam Putroe Neng	Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	 
7	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Gampong Banda Masen Kec. Banda Sakti	
8	Tugu Perlawanan TKR melawan Tentara Jepang	Keude Cunda, Kec. Muara Dua	
9	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	
10	Meriam Teuku Maharaja Abdul Hamid	Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti	
11	Tugu Lokasi Syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gampong Blang Buloh Kec. Blang Mangat	
12	Makam Tgk. Ulei Utan	Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti	

13	Islamic Centre dan Mesjid	Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	
----	---------------------------	---	---

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengembangan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan total anggaran sebesar Rp. 635.000.000,-
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 315.000.000.-

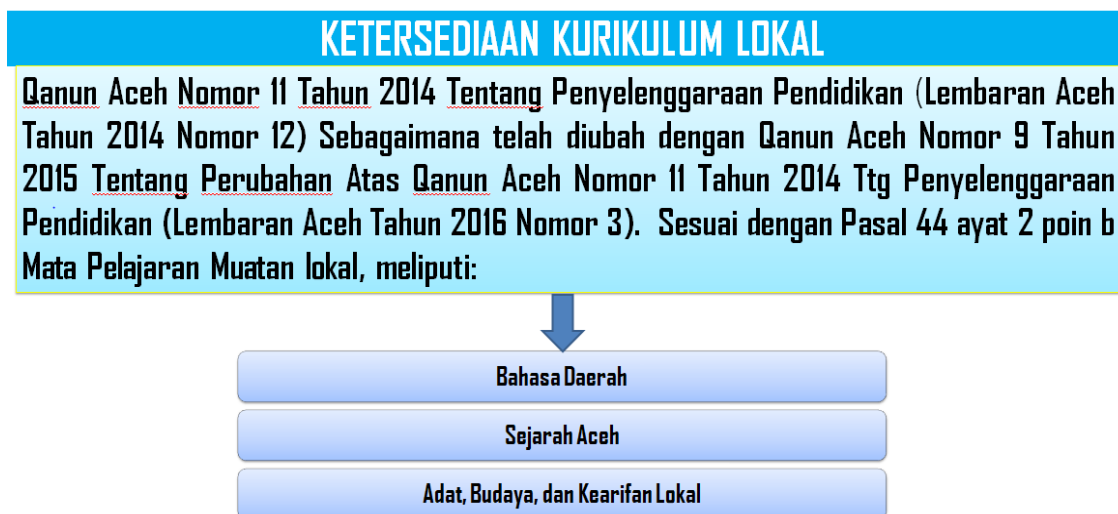
6. PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BUDAYA LOKAL

Sebagai benteng utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan, lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam melestarikan kebudayaan daerah. Sekolah, sebagai institusi pendidikan utama, harus mampu membentuk dan membimbing para siswa untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan kebudayaan daerah mereka.

Pertama, integrasi kurikulum yang memasukkan pembelajaran tentang kebudayaan daerah menjadi langkah penting untuk menghidupkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya lokal. Materi pembelajaran mengenai sejarah, seni, bahasa, dan adat istiadat daerah setempat harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Dengan demikian, para siswa akan memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan tentang kebudayaan daerah tempat mereka tinggal.

Dengan mengintegrasikan pembelajaran tentang kebudayaan daerah ke dalam kurikulum dan melibatkan para siswa dalam berbagai kegiatan yang mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal, kita dapat menjaga dan menghormati warisan budaya ini demi masa depan yang kokoh dan berwawasan budaya. Semoga generasi muda yang mencintai dan melestarikan kebudayaan daerah akan terus membawa kekayaan kultural

ini meresap hingga ke generasi mendatang dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

Kedua, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pentas seni, pameran budaya, atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di daerah setempat adalah cara efektif untuk membuka ruang bagi para siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan apresiasi terhadap kebudayaan daerah. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, para siswa dapat mengeksplorasi kreativitas mereka melalui seni, musik, tari, dan tradisi lokal. Berikut daftar penyelenggaraan kegiatan Museum Kota Lhokseumawe yang melibatkan Masyarakat:

No	Nama Kegiatan	
	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Panteu Meuseuraya Festival	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Workshop Seni dan BUdaya di Era Digitalisasi)
2.	Apeksi	Festival Kultural dan Kesenian Daerah
3.	Forum Group Diskusi	Pelatihan Hikayat dan Seumapa
4.	Ahad Festival	Bimbingan Teknis Konservasi Koleksi Museum
5.		Belajar Bersama Canang Ceureukeh
6.		Kajian Rapai Uroeh

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal didapat dengan membagi Jumlah Masyarakat Kota Lhokseumawe dengan Jumlah Partisipan yang berkunjung ke museum. Dengan bertambahnya penyelenggaraan kegiatan budaya lokal di museum Kota Lhokseumawe, hal ini berpengaruh signifikan terhadap Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal sebagai berikut:

Tahun	Target	Capaian
2023	75	7,8
2024	75	13,76

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Hasil capaian masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan terlalu luas cakupan variabel pembilang pada perhitungan Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya terdapat pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan total anggaran sebesar Rp. 521.900.000 dan pada Program Pengelolaan Permuseuman dengan total anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-

Sasaran 3:

Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya

IKU:

7. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

7. PERSENTASE PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah merupakan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Berikut beberapa cara untuk melakukan pelestarian dan pengembangan budaya daerah:

Pelestarian Budaya Daerah

1. Dokumentasi Budaya: Mendokumentasikan budaya daerah melalui foto, video, dan tulisan untuk mempertahankan rekaman sejarah dan budaya.
2. Pengembangan Museum: Membangun museum untuk melestarikan dan memamerkan koleksi budaya daerah.
3. Pengajian Budaya: Mengadakan pengajian budaya untuk mempertahankan pengetahuan dan tradisi budaya daerah.
4. Pelestarian Situs Budaya: Melestarikan situs-situs budaya seperti candi, kuil, dan makam untuk mempertahankan warisan budaya.

Pengembangan Budaya Daerah

1. Pengembangan Seni: Mengembangkan seni daerah seperti musik, tari, dan teater untuk mempromosikan budaya daerah.
2. Pengembangan Kerajinan: Mengembangkan kerajinan daerah seperti tekstil, keramik, dan ukiran untuk mempromosikan budaya daerah.
3. Pengembangan Pariwisata: Mengembangkan pariwisata daerah untuk mempromosikan budaya daerah dan meningkatkan ekonomi lokal.
4. Pengembangan Pendidikan: Mengembangkan pendidikan budaya daerah untuk mempertahankan pengetahuan dan tradisi budaya daerah.

Manfaat Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

1. Mempertahankan Identitas: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat mempertahankan identitas daerah dan membedakannya dari daerah lain.
2. Meningkatkan Ekonomi: Mengembangkan pariwisata dan kerajinan daerah dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3. Mempromosikan Budaya: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat mempromosikan budaya daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki 25 situs cagar budaya yang terdata, dan 13 situs cagar budaya yang dilestarikan. Dalam hal ini, pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan pada Tahun 2024 adalah sebesar 52% . Sedangkan pada Tahun 2023 pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan adalah sebesar 50%. Faktor Penyebab terjadinya kenaikan capaian dikarenakan adanya kebijakan pemerintah, kerja sama dan jaringan dengan organisasi lain, kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, sehingga situs cagar budaya yang terdata dan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Lhokseumawe mengalami perubahan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Situs Cagar Budaya yang terdata	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Target	Capaian (%)
2023	22	11	50	50
2024	25	13	50	52

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Berikut daftar cagar budaya yang terdata di Kota Lhokseumawe:

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
1	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti	Bangunan
2	Gua Jepang	Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu	Gua
3	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu	Makam
4	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tiang Gantungan	Makam : Gampong Mongedong	Makam
5	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tiang Gantungan	Tiang : Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti	Tiang Gantungan
6	Kawasan Bunker (Kurok-rok) Tentara Jepang	Gampong Hagu	Benteng

7	Makam Tgk. Dilhokseumawe	Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti	Situs Makam
8	Makam Putroe Neng	Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	Situs Makam
9	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Gampong Banda Masen Kec. Banda Sakti	Situs Makam
10	Makam Tgk. Ulei Utan	Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti	Situs Makam
11	Makam Syaikh Al-Kalaliy	Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti	Situs Makam
12	Tugu Perlawananan TKR melawan Tentara Jepang	Keude Cunda, Kec. Muara Dua	Tugu
13	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu	Situs Makam
14	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	Situs Makam
15	Makam Mualim Ahmad Taufiq	Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat	Situs Makam
16	Makam Teuku Maharaja Abdul Hamid	Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti	Situs Makam
17	Meriam Teuku Maharaja Abdul Hamid	Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti	Tugu
18	Tugu Lokasi Syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gampong Blang Buloh Kec. Blang Mangat	Tugu
19	Makam Prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gampong Blang Buloh Kec. Blang Mangat	Makam
20	Tugu Pertempuran Antara TNI melawan Tentara Laut dan Udara Belanda	Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti	Tugu
21	Kawasan Goa Ibrahim Tapa dan Cot Bukulah	Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu	Tempat Bersejarah
22	Rumoh Adat Ulee Balang Kuta Kareung	Gampong Mns. Mesjid Kec. Muara Dua	Rumah Tradisional

23	Makam Tgk. Batee Meutarah	Jeulikat Kecamatan Blang Mangat	Makam
24	Mon Tujoh	Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	Makam
25	Islamic Centre dan Mesjid	Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Mesjid

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2024

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengembangan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan total anggaran sebesar Rp. 635.000.000,-
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 315.000.000.-

Sasaran 4:

Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

IKU:

8. Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah

8. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mempunyai 8 Program

untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 3) Program Pengembangan Kurikulum;
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 6) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 7) Program Pengembangan Kesenian Tradisional; dan
- 8) Program Pengelolaan Permuseuman

Berikut pengukuran untuk Tahun 2024 atas delapan indikator program tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\% \\ = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar **100% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Sesuai Target).**

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Tahun 2024 adalah sebesar **100%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, telah mencapai target akhir yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Tahun 2024 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mencapai target disebabkan oleh:

1. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sering memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada pegawainya dalam setiap kesempatan. Selain itu, cara pemimpin dalam mengambil keputusan bergantung terhadap situasi yang ada. Apabila pemimpin memang membutuhkan masukan-masukan dari pegawai, maka pemimpin akan melakukan hal tersebut. Pemimpin sebagai top manajemen juga dapat mengambil keputusan sendiri, hal ini dilakukan apabila pemimpin memang tidak memerlukan masukan dari pegawai.
3. Kerjasama tim antar pegawai sangat solid. Tujuannya agar kinerja dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain dukungan antar pegawai, salah satu indikator capaian kinerja yang baik yaitu adanya koordinasi yang baik antar pegawai.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dan Program Pengelolaan Permuseuman dengan total anggaran sebesar Rp. 215.918.431.876 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 210.153.148.311 atau capaian kinerja anggaran sebesar **97,32%**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
1	Angka Kelulusan	Persen	100	99,10	100,91
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100,325	99,90	100,43
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	92,625	99,63	92,97
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	98,17	99,67	98,49
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman					

Budaya Lokal					
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	52	98,84	52,61
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	13,76	98,27	14
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya					
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	52	98,84	52,61
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	96,52	103,61
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024					

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Angka Kelulusan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 100,91% (Sangat Efisien);
2. IKU: Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 100,43% (Sangat Efisien);
3. IKU: Angka Partisipasi Murni menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 92,97% (Sangat Efisien);
4. IKU: Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 98,49% (Sangat Efisien);
5. IKU: Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 52,61% (Cukup Efisien);
6. IKU: Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 14% (Tidak Efisien);
7. IKU: Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 52,61% (Cukup Efisien); dan

8. IKU: Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 103,61% (Sangat Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 183.551.546	Rp. 160.502.250	87,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 149.914.340.200	Rp. 144.699.767.546	96,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 254.964.090	Rp. 254.903.855	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 513.000.000	Rp. 506.391.780	98,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.023.646.790	Rp. 980.341.823	91,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 244.000.000	Rp. 238.308.000	96,73
2. Program Pengelolaan Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 38.448.014.850	Rp. 38.232.682.501	99,44
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 15.438.282.000	Rp. 15.421.541.887	99,89
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 4.485.005.000	Rp. 4.426.553.470	98,69
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 2.752.551.000	Rp. 2.678.306.856	97,30
3. Program Pengembangan Kurikulum			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp. 260.176.400	Rp. 199.758.000	76,77
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	Rp. 99.000.000	Rp. 98.265.250	99,26
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Rp. 100.000.000	Rp. 87.567.000	87,57

Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Rp. 30.000.000	Rp.29.399.400	98
6. Program Pengembangan Kebudayaan			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 635.000.000	Rp. 621.475.996	97,87
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 315.000.000	Rp. 314.400.000	99,81
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 521.900.000	Rp. 506.523.627	97,05
8. Program Pengelolaan Permuseuman			
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 700.000.000	Rp. 696.459.070	99,49
Jumlah	Rp. 215.918.431.876	Rp. 210.153.148.311	97,32

Sumber: DPA Pergeseran Setelah Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024

Dari tabel diatas, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe dalam DPA Pergeseran Setelah Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp. 215.918.431.876, dan realisasi anggaran mencapai Rp. 210.153.148.311 atau serapan anggaran sebesar 97,32%, dengan demikian maka dapat

diketahui pada tahun anggaran 2024 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar
Rp. 5.765.283.565.-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebesar 97,32%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024, diharapkan dapat terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas dalam rangka meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya lokal.

Lhokseumawe, Februari 2025
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE,**


SOFIAN, S.Pd

Pembina Tingkat I
NIP. 19670424 199412 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

***“Terwujudnya Pendidikan Yang Melahirkan Insan Cerdas,
Kreatif, Mandiri Dan Berkarakter Islami”***

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mewujudkan visi tersebut melalui:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan
		Angka Partisipasi Kasar
		Angka Partisipasi Murni
		Angka Partisipasi Sekolah
1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan
		Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal
1.3	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
1.4	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 8 (delapan) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

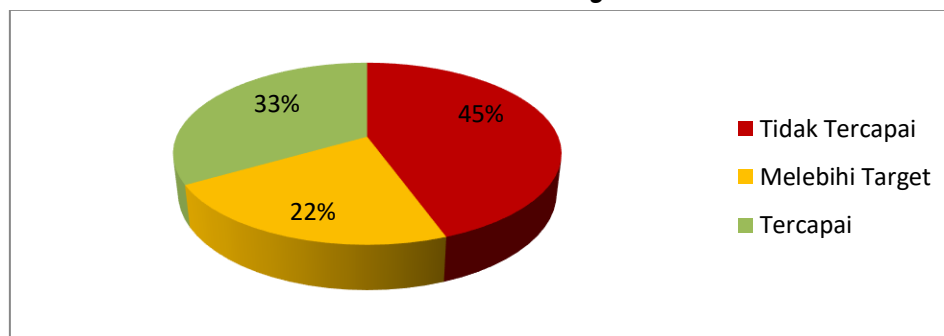
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Tercapai	
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100	100,325	Melebihi Target	
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	92,625	Tidak Tercapai	
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Tidak Tercapai	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	50	52	Melebihi Target	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	75	13,76	Tidak Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	52	Tidak Tercapai	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	Tercapai	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024						

Hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 8 (delapan) IKU yaitu sebanyak 2 IKU dengan predikat **Tercapai**, 2 IKU dengan predikat **Melebihi Target**, dan 4 IKU dengan predikat **Tidak Tercapai**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

**Diagram Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024**



Berdasarkan Diagram diatas, hasil pengukuran atas capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar **33%** atau 2 IKU telah **Tercapai**, **22%** atau 2 IKU telah **Melebihi Target**, dan **45%** atau 4 IKU **Tidak Tercapai**.